

BERTEOLOGI SOSIAL DALAM KONTEKS RADIKALISME KEAGAMAAN PADA ERA MILENIAL

Ratna Saragih

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
ratnasaragih12@yahoo.co.id

Abstract

Religious radicalism is not addressed in a natural and transparent way, so it is feared that there will be a destruction of society/ civilization (“something like the destruction of civilization”). The Purpose of this study is to strive for social theology in the context of religious radicalism. And this research is a qualitative research with exploratory description method. From this research it was produced: Controlling crime, religious people are compassionate people, and pave the theology of contextual religions.

Keywords: Theology, Social, Radicalism

I. PENDAHULUAN

Berteologi sosial merupakan keniscayaan dalam konteks radikalisme keagamaan. Berteologi pada dasarnya bukanlah olah pikir atau olah kata-kata semata, melainkan meliputi aksi kepedulian disamping analisa dan refleksi yang berkelanjutan. Tanpa upaya berteologi sosial maka dikuatirkan akan terjadi kehancuran peradaban. Oleh karena itu, mestinya setiap orang terlibat dalam upaya berteologi sebagai pertanggung jawaban imannya, akademis maupun non-akademis. Bagi kalangan non-akademis teologis mengetengahkan kritik sosial lewat seni lukis, seni pahat, seni suara semisal lagu pop – karya mereka bisa juga dikatakan sebagai upaya berteologi. Mereka berteologi sebagai aktualisasi imannya demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi kaum akademis berteologi merupakan tanggung jawab ketuhanan dan sekaligus kemanusiaan bahkan demi keutuhan ciptaan. Teologi sebagai ekspresi pergumulan iman yang terkait dengan konteks sosial kekinian dan kesediaan merefleksikannya secara terbuka. Disebut secara terbuka sebab iman Kristen merupakan hubungan yang hidup, dengan Yesus Kristus. Di samping itu, teologi juga lahir dari konteks. Konteks akan terus bergerak/berubah, maka teologi juga mustahil membekukan dirinya, tertutup atau anti terhadap perubahan. Kaum akademisi merefleksikannya secara sistematis. Diupayakan sistematis sebab teologi itu

bukan anti rasionalitas dalam artian setiap saat bisa diuji kesahihannya dalam rangka tindak lanjutnya (pengembangan dan relevansinya).

Upaya berteologi tersebut bukan tanpa jejaring para partisipan dan arah perkembangan yang antisipatif. Teologi yang rasional itu terbuka terhadap nalar publik. Terbuka menalar masalah bersama yang sedang mengancam keluhuran keluarga besar umat manusia secara khusus manusia Indonesia. Berteologi sosial itu juga merupakan ungkapan komunikasi iman yang bersahabat, konstruktif serta menyuburkan semerbak kembang pengharapan. Dengan demikian upaya dan tanggung jawab tersebut menolak pikiran sektarian (sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi) apalagi yang bisa menyulut kebencian, segregasi bahkan tindak kriminal. Berteologi sosial yang sadar konteks kekinian itu mewangi dan terbuka terhadap pengayaan wawasan serta pengertian dalam upaya memberikan sikap yang arif terhadap konteks sosial: kemiskinan yang parah, kemajemukan agama (agama-agama dunia; agama-agama suku), bahaya laten gurita korupsi, krisis ekologi, krisis HAM, dan radikalisme keagamaan.

Tentu kearifan, nalar yang rasional, dan komunikasi bersahabat itu merupakan prasyarat minimal menjadi manusia Indonesia dengankedewasaannya (*mature citizen*) menerima ke-Indonesia-an dengan segala kekuatan dan kelemahannya, kebhinekaan dan kesatuannya. Proses meng-Indonesia memang bukan mahakarya yang bisa terjadi dalam waktu singkat, kendatipun memang tonggak sejarah bersama menjadi Indonesia dengan keragamannya termasuk agama-agama telah terjadi sejak 17 Agustus 1945. Semua agama telah dipersatukan menjadi Indonesia. Adalah tepat apa yang dikatakan John Titaly berikut ini: “Indonesia bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Budha, dan bukan Konfusianisme. Indonesia ya Indonesia dengan peradabannya sendiri.”¹ Selanjutnya bersama UUD 1945 dan Pancasila bangsa kita terus berproses meng-Indonesia yang semakin demokratis dan humanis yang berkeadilan serta taqwa, dalam kerja sama yang mengglobal untuk keadilan dan perdamaian.

II. PEMBAHASAN

Teologi Sosial

Teologi sosial yang disebut di atas memang bersifat sosial – sejatinya semua teologi bersifat sosial - dalam eksistensi dan tujuannya. Pada dasarnya kata “sosial” menunjuk pada persahabatan dalam masyarakat. Bersahabat mengatasi masalah, ancaman atau tantangan bersama. Tujuannya juga berakhir pada persahabatan membangun masyarakat

¹Lih. “John Titaly Menjawab” dalam Steve Gaspersz dan Tedi Kholiludin (eds.), *Nyantri Bersama John Titaly: Menakar Teks, Menilai Sejarah dan Membangun Kemanusiaan Bersama*, Satya Wacana University Press, 2014, 493.

kebangsaan Indonesia sebagai sebuah keluarga dengan kemajemukan dan pergumulannya (yang bisa bikin hati miris), serta hari-hari perayaan nasional dan hari raya – hari raya keagamaan yang membesarkan hati.

Memelihara kerukunan demi kesejahteraan bersama menjadi poin yang sangat penting. Teologi sosial memandang perbedaan atau kemajemukan sebagai kekayaan. Dengan demikian berteologi sosial dalam konteks radikalisme agama berupaya mengurai atau membuka fertilisasi kepengapan, kran ketersumbatan, bayang-bayang ketakutan, sehingga rasa hangat kemanusiaan kembali bisa dinikmati secara bersama dalam atmosfer kedamaian. Sehingga karya cipta kembali subur bertumbuh-berkembang, berbunga-berbuah peradaban umat manusia yang ranum dan manis dalam kepelbagaian. Dan justru pada kerukunan dalam kepelbagaian itulah letak kebesaran bangsa Indonesia. Kepelbagaian menjadi kekuatan bangsa dalam kerukunan. Namun kehidupan bersama tidak selalu berjalan mulus kadang terbentur dengan anomali kehidupan.

Anomali Kehidupan

Konteks radikalisme merupakan anomali kehidupan yang harus dijawab dengan pendekatan sistemik dan holistik agar kehidupan jauh dari khaos dan dekat dengan damai sejahtera. Cara-cara mereka mengekspresikan pemahannya memang aneh-aneh berdasarkan pikiran normal, tetapi latar belakang yang mendorong mereka nekad melakukan tindak kriminal yang tidak berperikemanusiaan itu wajib dicermati. Di samping itu juga perlu dianalisa untuk menemukan sikap/tindakan sebagai solusi yang bijaksana.

Tentu radikalisme agama tidak mungkin ada jika tidak mulai muncul di dalam hati atau pikiran. Radikalisme bukan hanya yang tampak sebagai aksi kekerasan tetapi juga sebagai pikiran yang kejam. Pikiran yang kejam berpotensi destruktif bagi kehidupan bersama dalam konteks lokal, nasional dan internasional.

Radikalisme agama pada dasarnya adalah paham (isme) yang anti demokrasi. Disebut demikian sebab dalam demokrasi setiap orang mempunyai hak bicara. Mengkomunikasikan paham yang digumulinya dalam organisasi yang tak terlarang. Paham tersebut bisa kelihatan dalam aksi tetapi bisa juga tersembunyi dalam kedirian manusia. Paham yang tidak terbuka dibicarakan secara publik kemungkinan besar berpotensi penghancuran/pengrusakan kehidupan.

Anomali kehidupan yang dialami secara pribadi bisa saja berimbas buruk bagi kehidupan bangsa. Orang yang berniat bahkan berkehendak menggantikan dasar negara Pancasila atau apa saja yang sudah mapan dan teruji kesaktiannya selama ini menyokong tatanan kehidupan yang *meaningful*, dengan sesuatu yang samasekali baru secara paksa

atau kasar, maka di dalam dirinya bisa saja telah bertumbuh potensi **radikalisme**. Sebaliknya orang yang **anti radikalisme** di dalam dirinya tumbuh subur nilai-nilai Pancasila yang memungkinkannya berperilaku kemanusiaan, bertaqwa, beradab, tidak memaksakan kehendak, melainkan membicarakan pemahamannya dalam musyawarah. Oleh pimpinan hatinya yang bijaksana, maka ia juga berupaya adil dalam konteks pribadi, keluarga dan sosial. Demi kepentingan umum ia mampu menahan diri bahkan mengendalikan diri. Sikap yang demikian mencerminkan kedewasaannya bermasyarakat dalam segala perbedaan atau kemajemukan pada era kerja sama agama-agama dan era milenial.

Berteologi Sosial pada Dua Era

Berteologi pada dua era yaitu era kerja sama agama-agama dan era milenial merupakan tanggung jawab moral yang tak terhindarkan dewasa ini. Berteologi sosial tersebut terkait dengan tanggung jawab bersama demi penyembuhan dan penguatan masyarakat.

a. Tanggung jawab bersama

Membangun masyarakat irenik (bhs. Yunani “Irene”, artinya: damai) merupakan tanggung jawab semua agama. Jika agama-agama tidak bertanggung jawab bersama, maka mereka seharusnya malu sebagai kekuatan moral publik. Sebagai institusi-institusi keagamaan yang berdaya guna merekatkan berbagai pihak yang berbeda tapi satu asamembangun nusantara, maka seyogianya mereka terbukti piawai mengelola perbedaan. Perbedaan memang tak terhindarkan dan memang di dalam perbedaan bangsa kita menjadi besar. Dan justru perbedaan yang telah dikelola dengan baik itu berpotensi besar bagi pembangunan masyarakat dan bangsa yang bermartabat atau berkarakter.

Menurut Sukandarrumidi, tanpa Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan terbentuk.² Jadi, tekad bersatu dalam perbedaan membangun bangsa telah dibangun 17 tahun sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya bahkan jauh-jauh hari sebelum itu. Sumpah Pemuda dan Pancasila merupakan saudara kembar dalam eksistensi kita sebagai bangsa. Itulah jati diri kita sebagai manusia Indonesia yang telah menjadi manusia merdeka! Oleh karena itu, segenap rakyat Indonesia mestinya tidak akan abai berbangsa dan bernegara sebab tekad dan konsensus bersama telah ditulis

² Sukandarrumidi, “Abai Berbangsa dan Bernegara” dalam Sudjito dkk (eds.), *Jati Diri Manusia Indonesiadalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, h.97.

dengan tinta logam mulai di dalam hati setiap anak bangsa RI, bahwa kita satu adanya. Kemuliaan (baca: kebesaran) kita sebagai bangsa yang merdeka terletak pada tekad dan konsensus bersama itu. Dan mengaktualisasikan dengan sepenuh hati tanpa ada rasa “ingin memiliki apalagi menguasai”.³

Jika agama-agama gagal sebagai kekuatan moral spiritual melestarikan persatuan dalam upaya memajukan bangsa dengan kehidupan rakyat yang semakin maju berkualitas, maka agama-agama bisa menjadi bulan-bulanan kritik yang tak kunjung berhenti, seperti terjadi selama ini di dunia Barat. Menjadi bulan-bulanan sebab (khususnya di masa lampau) agama memberikan suatu moral dan etik - sumbangan etika agama-agama - yang tidak mendukung perbaikan nasib kaum buruh dan juga tidak mendukung perjuangan untuk melestarikan lingkungan.⁴ Oleh sebab itu, agama-agama wajib menjalankan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan etik global demi kehidupan yang utuh tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah lagi, di tanah air Indonesia serta dalam kerja sama antarnegara. Kita sebagai bangsa yang berkarakter luhur harus yakin teguh bahwa untuk membangun peradaban sangatlah mungkin tanpa pertumpahan darah. Hendaknya agama-agama tidak sempat kehabisan tenaga karena konflik yang berkepanjangan dan sia-sia. Menghindarkan sikap-sikap yang tidak terpuji di hadapan Sang Khalik dan sesama anak-anak bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda: “Kami putra dan putri Indonesia”. Kita Indonesia sebab kita bersaudara-saudari. Bersama berupaya agar tidak meninggalkan luka sejarah atau sejarah kelam yang menyebabkan anak cucu kita “saling mengintai atau memata-matai untuk saling mematikan”. Hendaknya anak-anak bangsa Indonesia dalam naungan sayap ibu pertiwi selalu siap sedia saling berbagi, melindungi, dan menghidupkan harapan bagi hidup bersama yang lebih baik, lebih bermartabat, di masa depan. Dalam rangka memekarkan harapan tersebut teologi harus dibebaskan dari ruang sempit kepeduliannya selama ini.

Dalam upaya menjawab masalah-masalah sosial dewasa ini kekristenan niscaya membangun hubungan yang tulus dengan agama-agama lain, demikian juga sebaliknya. Menurut Yahya Wijaya, gereja mempunyai panggilan untuk membagikan kabar baik kepada semua wilayah kehidupan, termasuk dunia bisnis,⁵ tentu termasuk juga dunia hubungan agama-agama.

³Sda.

⁴ Th. Sumartana, “Ekonomi, Ekologi dan Etika” dalam Y.B. Banawiratma dkk (eds.), *Merawat dan Berbagi Kehidupan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994, h.120.

⁵ Yahya Wijaya, “Gereja dan Etika Bisnis” dalam Supriatno dkk (eds.), *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja bagi Sesama*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia dan Majelis Sinode GKP, 2009, h.73.

Tetapi kita bersyukur keadaan telah berubah ke arah yang lebih baik, kendatipun di sana sini masih banyak pergumulan kita sebagai bangsa yang berdaulat dan terus maju melesat dari ketertinggalannya. Menurut Sumartana, agama-agama pada masa kini telah berkembang dalam tanggung jawab sosial atau kepeduliannya. Kritis terhadap perkembangan masyarakat yang eksploitatif. Agama-agama tampil menentang kritiknya dan mempertimbangkan secara serius struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai individualisme dan kapitalisme. ⁶Sebagai sesama anggota keluarga besar bangsa Indonesia, maka setiap individu berkewajiban melindungi dan tidak memeras atau merugikan sesamanya. Dan hendaknya itu menjadikarakter unggul warga NKRI dimana pun mereka berada.

b. Manusia era milenial

Bangsa Indonesia mengalami proses yang panjang menjadi manusia Indonesia yang pada akhirnya diikat dalam satu kesatuan bangsa (*nation*), yang perlu terus disadari bahwa ikatan itu merupakan simpul perjuangan yang panjang. ⁷Sebagai pertanggungjawaban antargenerasi, perjuangan para pendahulu tersebut wajib dihargai bahkan dijunjung tinggi serta dilestarikan oleh generasi yang terkemudian. Namun, manusia Indonesia tidak dapat dipungkiri mengalami perkembangan dalam kebhinekaanya. Karakter setiap generasi tentu beragam tetapi hendaknya tidak lari dari karakter *nation* tersebut: taqwa, *unity*, humanis, musyawarah, dan berkeadilan sosial.

Dalam sejarah manusia Indonesia lahirlah manusia pada era milenial yang punya karakteristiknya. Manusia era milenial cenderung gampang putus asa - tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang bunuh diri dalam proses studinya dewasa ini. Di samping mudah putus asa seorang budayawan Batak yang terkenal itu, Mochtar Lubis memetakan kejiwaan atau mentalitas sebagian tertentu masyarakat Indonesia sebagai berikut: Orang-orang muda dijangkiti hasrat kekuasaan, kurang adanya sikap bersungguh-sungguh, gelombang kejahatan yang semakin meningkat, gejala korupsi yang semakin meluas, dusta, munafik, terlalu lekas puas. Lalu Lubis mencatatkan bahwa mentalitas pembangunan yang ideal, meliputi sebagai berikut: penuh prakarsa, sikap produktif, dan mengembangkan satu kepribadian yang utuh dan kuat. ⁸

Generasi milenial yang lahir setelah tahun 1980-an itu merupakan generasi yang suka jalan pintas. Mereka gampang mengalami krisis sebab kurang disiplin dalam

⁶Sda.

⁷ Martin L. Sinaga, "Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum" dalam Tim Balitbang PGI (eds.), *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000, h.9.

⁸ Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, h.186-187.

disiplin rohani, misalnya doa. Selain itu mereka juga kurang disiplin mengekang hasrat konsumerisme, hedonisme dan keinginan serba nyaman dan praktis misalnya ketergantungan dengan gadget. Daya juang mereka juga melemah dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena itu gampang cari jalan pintas dan cenderung tidaksabaran. Untuk itu, merupakan keniscayaan bagi keluarga, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan berperan aktif bahkan proaktif menolong mereka agar memiliki daya tahan dan daya juang yang kuat menghadapi realitas hidup pada zaman now.

Bertolak belakang dengan keniscayaan di atas, pada abad ke-21 manusia pada umumnya dan generasi milenial khususnya memperoleh informasi dan gagasan lebih banyak melalui media massa daripada melalui keluarga, gereja dan sekolah. Oleh karena itu, menurut William Fore, semua kalangan harus belajar memahami kebudayaan bermedia baru ini mengenai nilai-nilai agamawi jika kita berharap untuk mampu mengarahkan pertanyaan kita akan makna dalam kebudayaan itu.⁹ Nampaknya tindakan bijaksana ditempuh kalau generasi milenial itu sendiri menjadi mitra sejajar pihak sekolah, gereja dan keluarga menyikapi masalah mereka memasuki kebudayaan tersebut. Tentu mereka membutuhkan pendampingan dan arahan agar jangan tersesat.

c. Konteks radikalisme keagamaan yang parah

1. Radikalisme keagamaan

Paham radikal dalam ranah keagamaan dibonceng oleh politisi yang “gila” kekuasaan – jangan-jangan mereka pulalah yang menjadi aktor intelektualnya (?). Orientasi pertumbuhan paham ini ialah kekuasaan. Di samping adanya pihak yang mendanai, pada dasarnya perkembangannya disebabkan oleh kedangkalan atau sempitnya wawasan, pengertian dan empati. Impotensi daya nalar kaum moralis dan agamawan menyebabkan mereka ganas dan penuh kebencian.¹⁰

Radikalisme keagamaan terjadi sebagai bentuk ketersesatan warga (sebagian generasi milenial). Mereka tersesat jauh dari jati diri bangsanya sendiri: Pancasila. Radikalisme keagamaan adalah paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena bertentangan, maka tidak sesuai dengan bangsa dan Negara RI. Dan, karena substansi Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai-nilai yang berlaku universal, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi paham radikal di bumi ini. Dunia membutuhkan keadilan dan perdamaian, sedangkan radikalisme

⁹ William F. Fore, *Para Pembuat Mitos: Injil, Kebudayaan dan Media*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002, h.37.

¹⁰ Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002, h.265.

keagamaan itu anti keadilan dan perdamaian. Jadi, Negara RI jelas anti terhadap radikalisme.

Kalau radikalisme agama tidak diatasi secara tegas dan transparan, maka dikuatirkan akan terjadi kehancuran masyarakat/peradaban (“*something like the destruction of civilization*”¹¹). Oleh karena itu semua orang seyogianya melibatkan diri sebagai pertanggungjawaban warga Negara yang peduli terhadap kehidupan sosial.

2. Radikalisme yang menggegerkan

Mengingat konteks radikalisme keagamaandi tanah air sudah sedemikian parah,¹² bisa tiba-tiba muncul (dampaknya) dimana-mana, maka semua agama yang anti radikalisme termasuk gereja bertanggung jawab menyelamatkan nusantara ini dalam jejaring kerjasama lintas agama. Pada kenyataannya, radikalisme agama itu anti terhadap demokrasi dan Pancasila, padahal tanpa keduanya masyarakat Indonesia akan “sakit” tercabut dari jati diri dan keberadaannya yang sesungguhnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

Nampaknya semua agama termasuk kekristenan sekaranglah saatnya mengeluarkan (baca: mengaktualisasikan) kekayaan ajaran-ajaran doktrinalnya yang paling kuat dan teruji secara historis dan yang bisa berdampak konstruktif lintas batas agama demi kehidupan sosial yang damai, *public good*. Sudah terlalu lama banyak warga gereja seperti keong yang menarik dirinya ke dalam cangkangnya dan nyaris tidak peduli dengan konteks sosial dalam praksis pastoralnya. Tidak dipungkiri bahwa dalam doa-doa dan ritual-ritualnya barangkali kepedulian itu masih sering terdengar indah secara puitis liturgikal. Tetapi sebagai anak kandung bangsa Indonesia cenderung abai berbangsa dan bernegara dalam arti yang sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan seluas-luasnya. Memenuhi hak dan kewajiban dalam pemilu itu jauh dari cukup. Memang kedaulatan ada di tangan rakyat tetapi justru karena itu tanggung jawab rakyat sangat besar demi kemajuan bangsa dan Negara.

¹¹ John Atherton (ed.), *Social Christianity: A Reader*, London: SPCK, 1994, h.114.

¹² Disebut parah sebab realitas sosial yang dibayang-bayangi oleh aksi kekerasan bisa tercermin dari *head line* harian KOMPAS 28 Mei 2019, dikabarkan bahwa Polri membongkar rencana pembunuhan terhadap empat pejabat Negara. Selain itu Polri juga membongkar sindikat penjualan senjata api serta menangkap dua pemilik senjata dan menyita satu rompi antipeluru. Selain itu, kita prihatin dengan kondisi yang terjadi dan korban kekerasan oleh perusuh 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Menyikapi keadaan pascakericuhan 22 Mei itu hendaknya masyarakat percaya TNI-Polri bahwa aparat keamanan bisa menangani situasi dengan baik. Lih. <https://www.batapor.com/2019/05/23/sri-mulyani-sangat-sayangkan-terjadi-rusuh-22-mei-di-jakarta/diunggah-pada-hari-Selasa,-28-Mei-2019,-pukul-15.21-Wib>.

Padahal, ajaran-ajaran doktrinal gereja itu sangat kaya makna serta lahir dari konteks sosialnya. Memang secara apokaliptis wahyu ilahi tidak dipungkiri tetapi dalam perilaku kepedulian dan praksis teologi wahyu tersebut dipertemukan dengan konteks sosialnya yang segar yang diharapkan melahirkan pencerahan dan kedamaian. Wahyu Ilahi membumi pada saat kehidupan mengalami masalah pelik, khaos, anomali kehidupan, itu berarti wahyu ilahi juga mempunyai konteks sosialnya. Bahkan demi konteks sosiallah wahyu Ilahi “hadir”.

d. Keadilan milik Allah

Keadilan merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh semua agama, kendatipun cara memahami konsep keadilan berbeda-beda. Tetapi persaudaraan bisa pecah semata-mata sebagai akibat ketidak-adilan. Krisis kerukunan pertama-tama dan utama bisa terjadi bukan dipicu oleh perbedaan agama, melainkan oleh ketidak-adilan. Sikap intoleransi antarumat beragama bisa menjadi-jadi sebagai reaksi emosional terhadap kebijakan publik yang bagi sekelompok orang dikira “pilih kasih” (kecemburuan sosial). Padahal segala sesuatu mestinya bisa dibicarakan secara musyawarah mufakat. Pemerintah bisa mengunjungi rakyatnya sesering mungkin dan rakyat bisa punya banyak kesempatan berkomunikasi dengan pemerintahnya dalam atmosfer kekeluargaan. Terkait dengan hal ini nampaknya kearifan lokal yang berkembang di kalangan orang-orang Batak menemukan aktualisasinya dalam era kerja sama agama-agama dan tanggung jawab kebangsaan ini: “Segala sesuatu misalnya sengketa atau konflik bisa diselesaikan dengan baik bila kedua belah pihak masih bersedia datang dan berjumpa untuk berbicara. Jadi, bagi orang Batak, kuncinya adalah berbicara, kendatipun kadang-kadang orang Batak cara bicaranya terkesan sangat kasar.”

Kehidupan memang tidak selalu adil tetapi kita bisa (baca: dimampukan) dalam intervensi-Nya menciptakan keadilan sebab keadilan adalah milik Sang Khalik. “Keadilan adalah milik Allah, bukan milik pemerintah maupun politikus.”¹³ Keadilan dalam aksi tentu dimulai dari keadilan dalam pembicaraan. Berbicara bersama agar keadilan-Nya dibagi rasakan. Filosofi tentang keadilan mendahului aksi namun filosofi juga bisa lahir dari aksi. Iman melahirkan aksi sosial namun aksi sosial juga bisa menyuburkan iman yang berkeadilan. Karena keadilan adalah milik Allah, maka wajib memeliharanya sepenuh hati ke arah pertumbuhan yang penuh secara *non-violence*.

III. PENUTUP

¹³ Naim Stifan Ateek, *Semata-mata Keadilan: Visi Perdamaian Seorang Kristen Palestina*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009, h.178.

Memelihara kerukunan demi kesejahteraan bersama merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Terkait dengan itu, memang semua orang terlibat dalam upaya berteologi dalam wawasan kebangsaan sebagai bagian dari keyakinan seseorang atau komunitas tetapi hendaknya tetap menjunjung tinggi “kekhususan dan identitas orang Indonesia: Percaya kepada Satu Allah, Humanisme, Kesatuan Nasional Indonesia, Demokrasi dan keadilan Sosial.”¹⁴ Teologi yang bertentangan dengan Lima sila Pancasila itu secara asasi tidak punya tempat bereksistensi di Indonesia. Semisal teologi kekerasan yang mengendalikan terorisme. Sangat jelas teologi kekerasan tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Mutiara Andalas, jaringan teroris yang memeluk teologi kekerasan pada kenyataannya mereka memandang target korbannya bukan sekadar musuh politik, melainkan musuh Allah.¹⁵ Oleh karena itu beberapa hal di bawah ini merupakan keniscayaan bagi warga Negara yang berjiwa Pancasila.

a. Mengendalikan kejahatan

Radikalisme agama mengancam kehidupan bangsa dan oleh karena itu orang yang masih mampu berpikir jernih atau berpikir sehat berkewajiban mengatasinya dengan doktrin dan praksis. Untuk itu perlu membangun narasi tandingan yang lebih manusiawi, bersahabat, komunikatif, dan kerja sama antarumat beragama. Di era kerja sama umat beragama ini justru konteks radikalisme agama dijawab dalam rangka membangun jejaring kerja sama itu untuk meningkatkan kualitas toleransi dan sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial semisal kekerasan. Kekerasan atau ketakutan harus diatasi. Untuk mengatasi ketakutan harus ada orang yang bersedia memulai. Orang-orang yang berjiwa pendidik seyogianya yang mengambil langkah pertama. Perkataan atau pengajaran mereka berpengaruh besar bagi para pelajar yang haus akanketeladanan hidup yang berbelas kasih, terpimpin, terarah, dan bersahabat. Banyak manusia pembelajar yang bersikap terbuka terhadap perkembangan peradaban tetapi melawan “pemikir-pemikir karatan”. Oleh karena itu, manusia Indonesia secara khusus kaum muda harus dididik menjadi generasi yang bersikap anti terhadap radikalisme.

Radikalisme agama sebagai anomali kehidupan yang tidak diinginkan tetapi berpengaruh buruk bagi generasi muda dan kehidupan umumnya, harus diatasi. Anomali kehidupan itu tidak dibiarkan merajalela, melainkan dikendalikan.

¹⁴ Karel Steenbrink, “Ilmu Agama Sebagai Penjaga bagi Kerukunan dan Pluralisme Agama” dalam *Jurnal Teologi Gema Duta Wacana*, Edisi 52 Tahun 1997, h.21.

¹⁵ Mutiara Andalas, *Politik Para Teroris*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010, h.61.

Kekejaman harus dikendalikan dan dihentikan secara bersama dan sistemik. Tindakan antisipatif atau pencegahan sangat perlu dilakukan yang terkait dengan Pendidikan Agama di Indonesia. Penulis mengemukakan contoh, pada saat menerima SK (Surat Keputusan), 1.159 CPNS Kemenag Aceh diingatkan agar setia kepada ideologi Negara dan tak terlibat paham radikal. Selain itu, mereka juga diingatkan oleh Kabag Tata Usaha Kemenag Aceh supaya mempelajari dan mengimplementasikan kode etik dan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.¹⁶

Radikalisme jangan diberi ruang hidup bereksistensi baginya apalagi berkembangbiak, bahkan melempar terror saja seharusnya dilarang keras sebab keberadaan atau aksinya bersifat menakutkan (tetapi seyogianya masyarakat tidak perlu takut), bahkan sangat kejam, keji, tidak berperikemanusiaan. Aksi-aksinya terkesan tidak punya pijakan rasionalitas yang mumpuni, pada intinya tersulut emosi kebencian semata dan oleh karena itu tidak mampu bernalar secara sehat apalagi bersahabat sebab itu radikalisme cenderung dekonstruktif. Penyakit sosial itu tidak hanya endemik tetapi juga punya daya tular yang perlu diwaspadai dalam sikap tanggap darurat.

Dalam peran kritis agama-agama di Indonesia, maka merupakan tugas bersama mencari tahu akar masalah radikalisme agama di Indonesia yang mungkin tidak bisa disamakan atau diseragamkan dengan radikalisme agama di Negara atau benua lain, kendatipun ada persamaannya pula. Nampaknya yang mendorong radikalisme di Indonesia bisa saja muncul sebagai akibat dari kemiskinan yang parah, ketidakadilan yang diklaim sepihak, kalah bersaing dalam dunia bisnis, kalah bersaing dalam dunia politik praktis, dll.

b. Manusia Indonesia, manusia yang berbelaskasih

Sesungguhnya berdasarkan teologi kurban dalam kekristenan dan saya kira juga dalam semua agama-agama Semitis (Yahudi, Kristen, Islam) tentang pengertian kurban bahwa pengurbanan manusia telah dilarang keras. Dunia telah mengutuk pengurbanan manusia seperti *holocaust* (kurban yang terbakar sampai habis) pada masa Nazi Jerman. Dalam ajaran kekristenan, Yesus Kristus mengurbankan diriNya bagi karya perdamaian Allah dengan manusia, dan pengurbanan Anak Manusia (Yesus) itu sebagai Anak Domba Allah telah menghancurkan perseteruan (akibat dosa manusia) antara Allah dan manusia.

¹⁶Koran harian *Sinar Indonesia Baru (SIB)*, 28 Mei 2019.

Karena kesempurnaan kurban-Anak-Domba-Allah, yaitu Yesus Kristus, maka kurban-manusia apalagi kurban-hewan tidak diperlukan lagi, dalam kekristenan. Pendamaian dengan Allah Bapa telah dibangun oleh Yesus sendiri dan untuk itu posisi manusia hanya menerima dampak penyelamatan dari karya-Nya. Itulah yang disebut dengan ANUGERAH Allah yang menyelamatkan: IMAN. Tetapi anugerah yang menyelamatkan itu berimplikasi etik sosial bahkan etik global, itulah yang dijabarkan dalam Tritugas Panggilan Gereja: *koinonia, marturia dan diakonia* – dalam pengertian seluas-luasnya, setinggi-tingginya, dan sedalam-dalamnya. Itu terkait dengan “pergumulan rangkap” duniawi-sorgawi, gereja-masyarakat, konservatif-sekuler, penyembuhan diri pribadi-penyembuhan masyarakat, dst.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia kurban-hewan berdampak ritual dan juga etis. Disamping makna ritual yang berdimensi vertikal sebagai cara hidup taqwa, kurban juga mempererat persaudaraan. Persaudaraan yang melampaui perbedaan-perbedaan. Dalam hal itu kurban tetap hewan bukan manusia (saudara-saudari sebangsa) yang dikurbankan. Hendaknya tetaplah hewan yang dikurbankan, atau kalau pun ada kebutuhan ritual pengkambing-hitaman untuk memuaskan naluri kekerasan yang muncul dari sisi gelap hati manusia, maka manusia itu seyogianya tetap menumbalkan hewan. Sejatinya ulah menumbalkan hewan juga harus memperhatikan belas-kasihan terhadap hewan dengan cara-cara penyembelihan yang beradab/beraturan. Semua manusia berpotensi marah oleh akibat beragam masalah atau anomali kehidupan yang parah tetapi manusia yang dewasa, arif dan rasional akan mengolah kemarahannya secara konstruktif melalui daya juang dan daya cipta seni¹⁷, filosofi, spiritualitas, dan olah pikir yang rasional konstruktif bagi persatuan Indonesia dan Indonesia yang lebih adil dan beradab. Manusia Indonesia menjadi pribadi yang secara mental sehat dan dimampukan menggapai keutuhan dirinya dalam karya lokal dan universal. Manusia Indonesia bersikap tegas menolak kekerasan dan paham-paham radikal sebab itu bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

c. Meretas teologi agama-agama kontekstual

Terkait dengan hal di atas, teologi agama-agama kontekstual meniscayakan substansi dan rohnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Indonesia merupakan tanggung jawab semua agama. Dengan demikian agama-agama di Indonesia tidak lagi sibuk

¹⁷ Menghadapi konteks pertarungan sengit antara pemilik modal dan rakyat jelata pada masa kini dalam masyarakat kapitalis sang seniman misalnya Bong Joo-ho (seorang Korea) menciptakan film komedi satire. Menyikapi hidup dengan meningkatkan semangat kerja keras serta bekerja cerdas dengan cara menertawakan kesulitan dan penderitaan. Lih. *KOMPAS*, 28 Mei 2019. Berani menertawakan kesulitan dan penderitaan merupakan sikap yang serius memandang kehidupan.

mengurusi urusan agamanya saja dan lalu cenderung diskriminatif. Teologi agama-agama yang kontekstual di Indonesia harus mengandung kebenaran dalam pengakuan bahwa sesama yang tidak sama dengan kita adalah setara (*equal*) adanya termasuk sesama yang tidak seagama. Sebagai warga Negara Indonesia kita setara. Bukankah agama-agama sejak 17 Agustus 1945 itu secara mendasar telah mengutamakan, mengedepankan, mengharumkan dan meluhurkan Indonesia daripada ikhwal agama itu sendiri? Kalau begitu semua umat beragama demi Indonesia yang adalah berkat rahmat Allah sejatinya harus rela mengorbankan kepentingan agama demi Indonesia daripada mengorbankan Indonesia demi kepentingan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, M. (2010). *Politik Para Teroris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ateek, N. S. (2009). *Semata-mata Keadilan: Visi Perdamaian Seorang Kristen Palestina*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Atherton, J. (ed.). (1994). *Social Christianity: A Reader*. London: SPCK.
- Budiman, H. (2002). *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fore, W. F. (2002). *Para Pembuat Mitos: Injil, Kebudayaan dan Media*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Gaspersz, S., & Kholiludin, T. (eds.). (2014). "John Titaley Menjawab" dalam Steve Gaspersz dan Tedi Kholiludin (eds.). *Nyantri Bersama John Titaley: Menakar Teks, Menilai Sejarah dan Membangun Kemanusiaan Bersama*. Satya Wacana University Press.
- Lubis, M. (1993). *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyantha, Y.B. (2016). "Berima dalam Perbuatan: Paham Iman Mangunwijaya dan Abdurrahman Wahid dalam Perbandingan" dalam Wahyu S. Wibowo dan Robert Setio (eds.). *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*. Yogyakarta: TPK & Fakultas Teologi UKDW.
- Sinaga, M. L. (2000). "Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum" dalam Tim Balitbang PGI (eds.). *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Steenbrink, K. (1997). "Ilmu Agama Sebagai Penjaga bagi Kerukunan dan Pluralisme Agama" dalam *Jurnal Teologi Gema Duta Wacana*, Edisi 52 Tahun 1997.
- Sukandarrumidi. (2013). "Abai Berbangsa dan Bernegara" dalam Sudjito dkk (eds.). *Jati Diri Manusia Indonesia: Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumartana, T. H. (1994). "Ekonomi, Ekologi dan Etika" dalam Y.B. Banawiratma dkk (eds.). *Merawat dan Berbagi Kehidupan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Wijaya, Y. (2009). “Gereja dan Etika Bisnis” dalam Supriatno dkk (eds.). *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja bagi Sesama*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia dan Majelis Sinode GKP.

<https://www.batapor.com/2019/05/23/sri-mulyani-sangat-sayangkan-terjadi-rusuh-22-mei-di-jakarta/diunggah-pada-hari-Selasa,28-Mei-2019,pukul-15.21-Wib>

Koran Harian *KOMPAS*, 28 Mei 2019.

Koran Harian *Sinar Indonesia Baru (SIB)*, 28 Mei 2019.